

PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PERAN ORGANISASI SOSIAL PADA PILKADA ENREKANG 2024

Uli Nuha¹; Haerusman²; Ema Amaliah³; Syaharuddin Alrif⁴; Andi Mulyadi⁵; Adli Lukman⁶, Herwin⁷

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Enrekang Indonesia
Jln. Jln. Jenderal Sudirman, Galonta, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan 91711
^{3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang Indonesia
E-mail : ulinnuhafira01@gmail.com (Koresponding)

Abstract: The use of digital technology in the modern era provides significant opportunities for strengthening local democracy, including in the context of Regional Head Elections. This study aims to analyze the role of social organizations in strengthening local democracy in Enrekang Regency in the 2024 Pilkada. This study uses a qualitative approach with a case study design, involving 10 key informants consisting of representatives of social organizations, community leaders, and digital media managers who are active in the Pilkada process. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis. The results of the study indicate that social organizations are able to increase public political awareness, expand access to information through digital media, and facilitate inclusive political discussions. However, challenges such as the digital divide and the spread of misinformation are significant obstacles in this process. This study concludes that collaboration between local governments, social organizations, and the community is crucial to maximize the potential of digital technology in creating inclusive, transparent, and sustainable political participation. The findings of this study provide a practical contribution to strengthening technology-based democracy at the local level and offer a novelty in a collaborative model for strengthening digital-based local democracy.

Keywords: *Local Democracy, Digital Technology, Community Participation, 2024 Regional Election, Social Organizations*

Demokrasi selain sebagai asas fundamental di hampir semua negara, demokrasi juga menjadi asas kenegaraan untuk penyelenggaraan suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Setiap warga negara mendambakan suatu pemerintahan demokrasi yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. (Putri Ayu Nabila et al., 2024).

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan

atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan. (Putri Ayu Nabila et al., 2024).

Demokrasi merupakan dasar yang paling utama dalam sistem politik di Indonesia yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpin mereka melalui proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dalam konteks local, Partisipasi aktif masyarakat selama Pilkada adalah pondasi dari proses demokratis yang kuat. Saat pilkada berlangsung, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan

transparansi proses pemilihan. Dengan menggunakan hak suara mereka secara bijaksana, mengawasi pemungutan suara, dan menjadi pengamat pemilihan, mereka memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam menggalang dukungan untuk kandidat yang mereka yakini akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dengan baik. Melalui partisipasi dalam debat publik, penyebaran informasi pemilihan, dan mendukung kegiatan pendidikan pemilih, masyarakat dapat memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan. Dengan berpartisipasi aktif selama Pilkada, masyarakat memainkan peran kunci dalam menjaga demokrasi lokal yang kuat dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. (Mofu, Maria Octoviani and Meltarini, 2024)

Kabupaten Enrekang, merupakan salah satu daerah dengan dinamika sosial politik yang cukup unik dengan julukan massenrengpulu, menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Berdasarkan data dan informasi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan organisasi masyarakat sebenarnya telah berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pedesaan melalui berbagai program dan kegiatan. Beragamnya latar belakang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, dan adat istiadat masyarakatnya menciptakan kebutuhan akan pendekatan yang inklusif untuk memastikan partisipasi politik yang merata (Abubakar et al., 2024).

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah, yang merupakan salah satu cara yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai alternatif dalam membangun sistem penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah mendatang yang lebih baik dalam menerapkan konsep demokrasi. Mengingat pesatnya perkembangan

teknologi saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada (Nike Purnamawati, 2024). Selain itu, Teknologi pintar juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi data yang digunakan dalam pelaporan administrasi. Sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data dengan lebih mendalam dan mendeteksi kesalahan atau anomali yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Misalnya, AI dapat mengidentifikasi inkonsistensi dalam data pemilu, seperti jumlah suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar, dan memberikan peringatan dini untuk dilakukan koreksi. Dengan demikian, kualitas dan keandalan laporan administrasi dapat ditingkatkan (Nuha et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pada era digital ini menghadirkan peluang baru untuk memperkuat dan memperkokoh demokrasi lokal. Era digital seperti saat ini tidak hanya memberikan manfaat saja, namun era digital juga menghadirkan tantangan tersendiri yang harus di hadapi setiap orang dalam beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Informasi yang di produksi oleh kemajuan teknologi mulai bergerak membentuk ruang public virtual sebagai sarannya mewakili kemauan dan menyatakan keberadaan mereka. Keberadaan teknologi baru mengundang kita untuk berpikir ulasan mengenai demokrasi di era digital saat ini (Andriani, 2022).

Organisasi sosial di Kabupaten Enrekang yang diantaranya adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Anshor, ICMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), GMNI, Komunitas Adat dan lain sebagainya telah menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi

era digital. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat tidak hanya melakukan sosialisasi program bagi calon kepala daerah yang ada, akan tetapi organisasi kemasyarakatan tersebut juga berperan menjaga nilai dan martabat demokrasi melalui pendidikan politik kepada masyarakat (Simanjong et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi digital oleh organisasi sosial dalam keterlibatannya secara aktif dan langsung pada tahapan pilkada tahun 2024 dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana inovasi masyarakat lokal dapat memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi berskala nasional, utamanya dalam memberikan peningkatan terhadap keterlibatan aktif organisasi sosial masyarakat secara inklusif.

pada sisi lainnya, studi ini juga memastikan bagaimana keberadaan teknologi digital dapat menciptakan kesenjangan informasi, terutama bagi kalangan masyarakat yang masih kurang memiliki akses terhadap teknologi dikarenakan masih minimnya akses jaringan internet pada suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, organisasi sosial perlu memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Penelitian ini diarahkan untuk menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam terhadap pengalaman organisasi sosial di Kabupaten Enrekang pada gelaran pilkada tahun 2024 yang lalu. Fokus utamanya adalah pada strategi digital yang digunakan dan dampaknya terhadap dinamika sosial dan politik di wilayah Kabupaten Enrekang.

Sebagai bagian dari demokrasi lokal, Pilkada di Kabupaten Enrekang tidak hanya menjadi arena kompetisi politik belaka, tetapi juga ujian bagi keberlanjutan nilai-nilai demokrasi. Di era digital yang terus berkembang pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam konteks demokrasi.

Pesatnya kemajuan era digital tentunya juga membawa berbagai dampak, baik yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media social, telah mengakibatkan akses terhadap informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan internet di Indonesia semakin pesat yang dapat memberikan dampak terhadap pemerintahan dan politik di Negara ini (Andriani, 2022).

Peningkatan terhadap kesadaran politik masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi sosial dalam mendukung proses demokrasi yang berintegritas pada suatu daerah. Dengan pendidikan politik yang berbasis teknologi dan informasi, diharapkan masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin sesuai hati nuraninya.

Namun, digitalisasi juga tidak terlepas dari adanya berbagai risiko, seperti polarisasi masyarakat akibat perbedaan pandangan politik yang diperkuat oleh algoritma media sosial. Hanya saja, apa yang terjadi sekarang adalah semakin kentalnya polarisasi setelah adanya unsur religiusitas serta nasionalisme yang meresap ke dalam ekspresi-ekspresi politik di media sosial (Rahmawati, 2018). Organisasi sosial harus mampu memitigasi risiko ini dengan mempromosikan dialog yang konstruktif di antara masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mengatur, melindungi privasi, meningkatkan literasi media, dan menangani konten negatif. Dengan menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko, Indonesia dapat memanfaatkan potensi teknologi dan media sosial untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang inklusif, transparan, dan responsif dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih sehat yang juga

memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang adaptif menjadi faktor kunci dalam keberhasilan upaya ini (Fitriani et al., 2023).

Dengan menilai pengalaman Kabupaten Enrekang pada setiap perhelatan demokrasi pemilu dan pemilihan kepala daerah, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang baru tentang penguatan demokrasi lokal di era digital. Hasilnya dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi yang lebih baik terhadap perhelatan dan proses demokrasi di masa yang akan datang.

Keberhasilan demokrasi lokal di era digital sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Organisasi sosial, sebagai aktor utama dalam konteks ini, memiliki peluang yang sangat besar untuk membuktikan bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan dukungan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital yang diteliti oleh Ambia B. Boestam dkk. pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Era digital semakin maju, partai politik semakin banyak memanfaatkan proses demokrasi virtual sebagai upaya untuk memperluas basis dukungan dan mempengaruhi pemilih. Beberapa upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam memanfaatkan proses demokrasi virtual antara lain: Kampanye digital, Partai politik menggunakan media sosial untuk mempromosikan kandidat dan platform politik mereka. Penggunaan kampanye digital, partai politik lebih banyak dipilih pemula sehingga mudah berkomunikasi dengan para pemilih potensial dan terjaminnya e-vote. Namun, sistem ini juga memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah penipuan dan kecurangan. Selain itu fungsi debat virtual, Partai politik juga dapat

menggunakannya sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan pemilih dan memperkenalkan kandidat, meskipun diperlukan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Meskipun demokrasi virtual menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan efisiensi proses pemilihan, namun pada prakteknya masih memerlukan kepastian integritas dan keabsahan hasil pemilihan (Boestam et al., 2023).

2. Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital yang diteliti oleh Juleha dkk. pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam dinamika opini publik dan partisipasi politik. Beberapa contohnya termasuk perubahan cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan terlibat dalam kehidupan politik. Dampak yang diberikan oleh media sosial membentuk dinamika opini publik dan partisipasi politik yang bagaikan dua sisi mata uang. Berdampak positif dan negative. Tentunya dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan kegiatan politik di tengah berkembang pesatnya media sosial di era digital ini (Juleha et al., 2024).
3. Peran Masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas yang diteliti oleh Suwarni Akhmaddihian dkk. pada tahun 2020, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa fungsi Bawaslu Jawa Barat dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Berdasarkan kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis yang memiliki korelasi dengan objek penelitian, bahwa pelaksanaan fungsi

pengecanaan yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat sudah sesuai dengan aturan. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki, salah satu sorotan yang menjadi perbincangan dari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi adalah menyangkut ada beberapa ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat (Akhmaddhian et al., 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis peran organisasi sosial dalam memperkuat demokrasi lokal di era digital, khususnya terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Enrekang pada tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut (Sugiyono, 2020).

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sosial di Kabupaten Enrekang memainkan peran penting dalam menggerakkan partisipasi politik masyarakat pada tahapan Pilkada tahun 2024 dengan memanfaatkan platform teknologi digital. Organisasi sosial masyarakat tentunya telah beradaptasi dengan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, tiktok dan WhatsApp untuk menyebarkan informasi terkait dengan peraturan perundang undangan tentang pemilihan kepala daerah, tentang calon kepala daerah beserta dengan visi dan misinya. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi alat yang sangat efektif dalam memperluas jangkauan informasi dan komunikasi tentang politik, terutama pada daerah dengan akses informasi dan komunikasi yang sangat terbatas. Dalam era komunikasi politik digital, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan luas

melalui berbagai platform online, seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan instan. Para politisi dengan menggunakan media sosial dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat tanpa perantara. Selain itu, media sosial juga memungkinkan informasi dan pesan politik dapat dengan cepat menyebar luas, menciptakan dampak yang lebih besar daripada retorika semata (Megi Primagara, 2024).

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini bahwa organisasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pada kegiatan-kegiatan diskusi politik di tingkat lokal. Melalui forum diskusi online, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan berdiskusi secara langsung mengenai isu-isu politik yang relevan dengan Pilkada Kabupaten Enrekang tahun 2024. Tentunya hal ini sangat memberikan kontribusi nyata pada peningkatan terhadap kesadaran politik masyarakat yang lebih mendalam. Fungsi komunikasi politik sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Melalui berbagai media dan platform komunikasi, pemerintah dapat menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai kebijakan, program, dan perkembangan terkini yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat (Syauket et al., 2020).

Meskipun penggunaan media sosial dapat memungkinkan akses jangkauan yang lebih luas, akan tetapi ada beberapa tantangan yang muncul terkait dengan kualitas informasi yang disampaikan. Beberapa organisasi sosial mengakui bahwa kesulitan dalam mengontrol penyebaran informasi melalui digitalisasi yang tidak akurat atau mengandung unsur hoaks, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses tahapan pemilihan kepala daerah dan tentunya juga kepada calon kepala daerah itu sendiri. Untuk itu dalam menghadapi dinamika informasi di era digital, pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu mengoptimalkan pengelolaan informasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang

disampaikan kepada publik dapat dipercaya dan membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik yang tinggi akan memperkuat keterlibatan masyarakat didalam proses pembangunan nasional, sehingga menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama (Suryana, 2024).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi sosial berperan aktif dalam mendidik masyarakat mengenai hak-hak politik mereka melalui berbagai media, termasuk video pendek dan infografis yang dibagikan melalui WhatsApp, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Strategi ini terbukti sangat efektif untuk menjangkau akses pada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan lebih sering terlibat dalam diskusi politik di media sosial.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat yang telah berumur lebih tua masih mengandalkan sumber informasi secara tradisional, seperti pengumuman di kantor desa, sarana ibadah atau pada saat pertemuan dalam komunitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat memperluas akses jangkauan, pendekatan berbasis teknologi tentunya harus diimbangi juga dengan metode konvensional untuk memastikan inklusivitas dalam proses demokrasi (AJI, 2012).

Salah satu peran signifikan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana organisasi sosial di Kabupaten Enrekang dapat mengurangi polarisasi politik yang semakin tajam akibat perbedaan pandangan politik yang sering diperburuk oleh algoritma media sosial. Beberapa organisasi sosial mencoba untuk menyelenggarakan acara dialog yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang politik. Hal ini berfungsi untuk mengurangi ketegangan dan mendorong diskusi yang lebih konstruktif dan bermakna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota organisasi sosial, mereka menyatakan bahwa keberhasilan mereka dalam meningkatkan partisipasi pemilih sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk membangun kepercayaan di kalangan

masyarakat. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi dalam menyampaikan informasi tentang Pemilihan kepala daerah dan memastikan bahwa pesan-pesan kampanye yang disampaikan tidak memihak atau bersifat partisan. Strategi ini penting untuk menjaga objektivitas dalam berdemokrasi dan proses politik yang lebih sehat.

Temuan lainnya yaitu bahwa organisasi sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang memainkan peran strategis sebagai penghubung antara calon kepala daerah dan masyarakat secara luas. Mereka berperan sebagai mediator untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program serta visi dan misi yang diusung oleh calon kepala daerah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menentukan pilihannya.

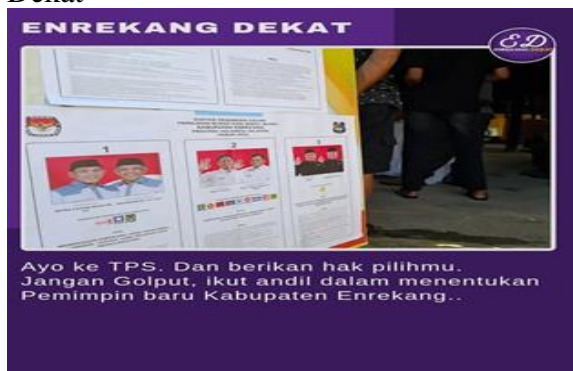
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun era digital memiliki berbagai tantangan yang unik, terutama terkait dengan kesenjangan akses teknologi informasi dan potensi penyebaran informasi palsu atau berita hoaks, organisasi sosial di Kabupaten Enrekang telah berhasil mengadaptasi strategi digital untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan tetap mengedepankan inklusivitas dan transparansi, organisasi sosial dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam penguatan demokrasi lokal, terutama dalam konteks Pilkada 2024.

Tabel I: Nama - Nama Organisasi Sosial di Kabupaten enrekang

No	Nama Organisasi
1	Muhammadiyah
2	Nahdlatul Uama
3	KNPI
4	HMI
5	IMM
6	Pemuda Muhammadiyah
7	Nasyiatul Aisyiah
8	Pemuda Anshor
9	ICMI
10	PMII
11	GMNI
12	Komunitas Adat

Sumber: Kesbangpol Kab. Enrekang

Gambar I: Media Sosial Facebook Enrekang Dekat



Sumber: Facebook 27 November 2024 Pukul 08.15 Wita

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa organisasi sosial di Kabupaten Enrekang telah bertransformasi dari aktor sosial-konvensional menjadi aktor demokrasi digital yang adaptif. Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memperkuat fungsi komunikasi politik yang lebih partisipatif dan interaktif. Hal ini sejalan dengan pandangan Lubis et al. (2022) bahwa politik digital memungkinkan komunikasi dua arah tanpa perantara, sehingga mempercepat distribusi informasi politik dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Pilkada Enrekang 2024, strategi digital yang diterapkan organisasi sosial terbukti meningkatkan literasi politik, khususnya di kalangan pemilih muda.

Lebih lanjut, peran organisasi sosial sebagai fasilitator diskusi publik menunjukkan praktik demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Forum diskusi daring dan dialog lintas kelompok menjadi ruang artikulasi aspirasi masyarakat secara lebih inklusif. Temuan ini memperkuat argumentasi Fitriani et al. (2023) bahwa teknologi digital dapat menjadi instrumen penguatan partisipasi politik apabila dikelola secara kolaboratif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, organisasi sosial tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membangun ruang dialog yang mendorong pembentukan opini publik yang rasional.

Namun demikian, penelitian ini juga mengonfirmasi adanya tantangan struktural berupa kesenjangan digital. Akses internet yang belum merata di wilayah pedesaan membatasi efektivitas strategi digital secara menyeluruh. Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi digital belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, pendekatan hybrid menggabungkan metode digital dan tatap muka menjadi strategi adaptif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Temuan ini relevan dengan konsep inklusivitas demokrasi yang menekankan akses setara terhadap informasi politik.

Selain kesenjangan akses, risiko disinformasi dan polarisasi politik juga menjadi tantangan signifikan. Sebagaimana dikemukakan Rahmawati (2018), algoritma media sosial berpotensi memperkuat segregasi opini dan memperdalam fragmentasi sosial. Dalam konteks ini, organisasi sosial di Enrekang berupaya mereduksi polarisasi melalui dialog terbuka dan penyampaian informasi yang bersifat netral. Strategi ini berkontribusi pada pembangunan kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan prasyarat utama dalam demokrasi lokal yang sehat.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menguatkan bahwa penguatan demokrasi lokal di era digital tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan oleh kapasitas aktor sosial dalam mengelola teknologi tersebut secara etis, inklusif, dan kolaboratif. Model sinergi antara organisasi sosial, pemerintah daerah, dan masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan pola kolaboratif yang berpotensi direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, demokrasi digital pada level lokal dapat berkembang secara berkelanjutan apabila didukung oleh literasi digital, regulasi adaptif, serta komitmen kolektif untuk menjaga integritas proses politik.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa organisasi sosial di Kabupaten Enrekang memainkan peran yang sangat krusial dalam memperkuat demokrasi lokal

melalui pemanfaatan teknologi di era digital terutama dalam tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Melalui media sosial dan platform digital yang tersedia, organisasi sosial dapat memperluas jangkauan informasi politik, meningkatkan kesadaran politik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang berintegritas. Meskipun teknologi digital menawarkan berbagai peluang, tantangan utamanya diantaranya adalah kesenjangan terhadap akses informasi dan potensi penyebaran berita hoaks atau informasi palsu masih menjadi hambatan yang harus diatasi dan menjadi perhatian utama.

Organisasi sosial di Kabupaten Enrekang juga berfungsi sebagai salah satu mediator antara calon kepala daerah dengan masyarakat, yang memungkinkan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis data dalam menentukan pilihannya. Keberhasilan organisasi sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih tentunya sangat bergantung pada strategi transparansi dan kepercayaan yang dibangun di kalangan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, keberhasilan organisasi sosial dalam mengurangi polarisasi politik dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dialog publik dan dialog politik yang konstruktif juga merupakan salah satu temuan utama dalam penelitian ini.

Secara umum bahwa meskipun digitalisasi membawa tantangan tersendiri, akan tetapi organisasi sosial di Kabupaten Enrekang memberikan kontribusi nyata dalam mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan dalam tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penelitian ini menawarkan model sinergi antara organisasi sosial dan pemerintah daerah berbasis pemanfaatan teknologi digital yang dapat direplikasi di daerah lain sebagai bentuk inovasi penguatan demokrasi lokal di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, M., Abdullah, T., & Hidayat, B. (2024). Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Akar Rumpuk melalui Gerakan Kelompok Tani di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. *9*(4), 314–322.
- AJI, A. J. I. (2012). Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita. *1*(1), 37–72.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1–10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Andriani, A. D. (2022). Demokrasi Damai Di Era Digital. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, *1*(1). <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). Upaya Partai Politik Dalam Memanfaatkan Demokrasi Virtual Di Era Digital. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, *6*(1), 1–17. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i1.2281>
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, *1*(4), 362–371. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43>
- Juleha, J., Yuniar, J., Marsuki, N. R., Sultan, J., 259, A. N., Sari, G., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik dan Partisipasi Politik Era Digital. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *3*(1), 38–45. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951>

- Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 193–206. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064>
- Megi Primagara, N. Y. (2024). Tiktok Sebagai Sumber Informasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala. 1(6), 32–40.
- Mofu, Maria Octoviani and Meltarini, M. (2024). Analisis Pelembagaan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021 Di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Maria. *Eprints.Ipdn.Ac.Id*, 75(17), 399–405. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19788>
- Nike Purnamawati, E. A. F. (2024). Strategi Komunikasi Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pemilihan Kepala Desa Puntik Dalam Di Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala. 6, 137–149.
- Nuha, U., Danindra, F., Ardat, M. A., & Hatta, M. (2024). Implikasi Penerapan Teknologi Pintar dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Administrasi di Bawaslu Kabupaten Enrekang. 1(1), 82–88.
- Putri Ayu Nabila, Padilatul Ilmi NST, Intan S, Siti Fatimah, & Bambang Trisno. (2024). Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 134–142. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1313>
- Rahmawati, D. (2018). Risiko Polarisasi Algoritma Media Sosial: Kajian Terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 33(Maret), 37–49.
- Simanjanrang, B. M., Bangun, I. br, & ... (2024). Keterlibatan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Dalam Menjaga Kualitas Demokrasi Di Kota Medan. *Innovative: Journal Of ...*, 4, 2830–2837. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7860%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7860/5550>
- Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Suryana, A. Y. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN Informasi Di Era Digital Guna Menyukseskan Pembangunan Nasional. *Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Lembaga Ketahanan Nasional RI*. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-09240000000017/swf/7792/03 - Ade Yaya Suryana.pdf>
- Syauket, A., Indriasari, R., Prayitno, R. B., Mendrofa, D. E. K., & Cornelia Evelin Cabui. (2020). KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAHAN. In *Journal GEEJ* (Vol. 7, Issue 2).
- Taroreh, B. (2021). Analisis Tematik Data Kualitatif Pada Pengembangan Perangkat Pembelajaran Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR). *SNFKIP 2021: Pendidikan Bagi Masyarakat Di Daerah 3T*, 17, 167–176. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%III.pdf)
- V. Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. *PT. Rineka Cipta, Cet.XII)an Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet.XII)*, 107.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>